



# ANALISIS WACANA POLARISASI DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DAN TWITTER (X) PADA PEMILU 2024

Siti Fatimah Nur Azmah<sup>1</sup>, Endry Boeriswati<sup>2</sup>, dan Siti Ansoriyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Jakarta

<sup>1</sup>azmahfatimah@gmail.com

<sup>2</sup>endry.boeriswati@unj.ac.id

<sup>3</sup>siti.ansoriyah@unj.ac.id

Dikirim: Mei 2025, Direvisi: Mei 2025, Diterima: Juni 2025

## Keyword:

Discourse Analysis;  
Political Polarization;  
2024 Election;  
Social Media.

## Abstract

The polarization that occurred on social media Instagram and Twitter (X) in the 2024 election led to restrictions on the content of each candidate. However, polarization is not only positive, there is also negative. This happened in the 2024 election, namely the issues of each presidential and vice presidential candidate were raised through content and displayed in the form of narratives, audio, and visuals, even leading to hoaxes. The patterns of diction and narrative used in social media Instagram and Twitter (X) were able to lead public opinion, so the author was interested and felt the need to conduct this research with the hope of being able to bring a new perspective through discourse analysis on polarization on social media in the 2024 election. The purpose of this study is to describe factually and systematically the facts and their relationship to the observed phenomena. The data collection technique used in this study was a content analysis study with a qualitative approach. The results of the study show two things, first, the narrative/news text used by Twitter social media users is not just news text, but has nuances of arguments and descriptions that explain news issues to viewers about negative issues in the 2024 election. Second, the discourse of social media, especially Instagram, tends to raise controversial issues in Indonesia.

## Kata Kunci:

Analisis Wacana;  
Polarisasi Politik;  
Pemilu 2024;  
Media Sosial.

## Abstrak

Polarisasi yang terjadi di media sosial Instagram dan Twitter (X) pada pemilu 2024 mengarah pada pembatasan konten setiap calon. Akan tetapi, polarisasi tidak hanya berbentuk positif, ada juga yang berbentuk negatif. Hal itu terjadi dalam pemilu 2024, yaitu isu-isu dari setiap capres dan cawapres diangkat melalui konten-konten dan ditayangkan dalam bentuk narasi, audio, maupun visual bahkan mengarah pada hoaks. Pola-pola diksi dan narasi yang digunakan dalam media sosial Instagram dan Twitter (X) mampu menggiring opini masyarakat, sehingga penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian ini dengan harapan mampu membawa sebuah kebaruan perspektif melalui analisis wacana terhadap polarisasi di media sosial pada pemilu 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara faktual dan sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungannya dengan fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *content analysis* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal, pertama, narasi/teks berita yang digunakan oleh pengguna media sosial Twitter tidak hanya sekadar teks berita, tetapi bernuansa argumentasi dan deskripsi yang menjelaskan isu pemberitaan terhadap pemirsa tentang isu negatif pada pemilu 2024. Kedua, wacana media sosial khususnya Instagram cenderung mengangkat isu-isu kontroversial yang ada di Indonesia.

Penulis Korespondensi: [azmahfatimah@gmail.com](mailto:azmahfatimah@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Di era informasi, media sosial adalah sesuatu yang umum dan akrab bagi semua orang. Saat ini, media sosial adalah salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan dan juga populer. Media sosial memungkinkan orang untuk berbagi ide, konten, dan informasi dengan cepat dan tanpa batasan. Namun, terdapat aspek negatif dari media sosial. Platform media sosial bagi negara demokrasi terbesar di dunia, seperti India dan Indonesia telah dibanjiri dengan informasi dan berita palsu (hoaks) yang menyebar dengan cepat dan terkadang menimbulkan konsekuensi dalam politik.

Bagi negara demokrasi, media sosial memiliki peran penting bagi masyarakat. Dengan media sosial, masyarakat dapat menafsirkan dan mengamati informasi politik, terutama liputan terkait pemilu. Media sosial bukan hanya berupaya melibatkan masyarakat secara langsung dalam aktivitas politik, melainkan dapat memberikan pengaruh terhadap preferensi politik seperti dalam hal pemungutan suara, berkomunikasi kepada pejabat publik, dan keikutsertaan dalam gerakan protes terhadap pemerintah.

Menurut Kemp tahun 2023 ada 167 jutaan pengguna media sosial pada Januari 2023. Media sosial merupakan media penting bagi politisi, partai politik, dan pemerintah untuk berhubungan dengan publik karena banyak orang yang menggunakannya. Salah satu kajian komunikasi massa terkini adalah kajian mengenai media sosial, dimana media sosial digunakan sebagai hal yang memungkinkan untuk mentransmisikan budaya secara memadai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi transmisi ini juga disebut sebagai salah satu fungsi esensial. Menurut Harold D. Lasswell, seorang tokoh komunikasi massa, dari satu generasi ke generasi berikutnya, nilai dan standar masyarakat tertentu akan ditransmisikan (Arif, 2012).

Media sosial digunakan sebagai alat komunikasi politik hasil dari perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat. Menurut Nurhidayat dan Garis, latar belakang perkembangan komunikasi politik di media sosial menurutnya disebabkan oleh beberapa hal, yakni kemudahan akses internet, potensi pasar politik yang besar, kemampuan berpartisipasi dan berbagi informasi, serta kekuatan pengaruh media sosial. Media memoderasi dorongan dan tarikan ruang (Nurhidayat & Garis, 2023). Bentuk media sosial yang penuh kebebasan mempunyai peluang besar untuk disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang dapat diakses dengan cepat di profil pengguna atau *snapshot* (Sumanti, 2023). Kegiatan yang diunggah oleh pengguna dapat berupa informasi dari status sosial ekonomi pengguna baik realitas maupun ruang telah diremediasi oleh media karena menggunakan digital *middleman*, proses mediasi ini bisa berjalan dengan cepat (Bolter & Grusin, 2000).

Ruang digital hari ini telah menjadi pertarungan ruang kuasa. Menurut Haryadi Santoso ruang hari ini, ruang media tidak lagi berkuat pada *statebased power*. Bukan pula terhenti pada kekuasaan berbasis pasar yang pada akhirnya digantikan oleh kekuasaan politik dominasi, berbasis politik ini muncul pada saat politik mendominasi dalam memutuskan semua isu, termasuk krisis kumulatif di sektor media (Santoso, 2015).

Mencipta opini dan kebenaran menurut Foucault (Syafiuddin, 2018) sangat berhubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada permainan kekuasaan yang tidak menghasilkan pengetahuan, dan tidak ada kumpulan informasi yang tidak mengkaji dinamika kekuasaan. Manusia modern lahir sebagai objek dan subjek dari penyediaan dan distribusi jaringan kekuasaan. Analisis kekuasaan Foucault secara bersamaan diartikulasikan pada dua tingkat, yakni empiris dan teoretis. Tingkat pertama didasarkan pada pemeriksaan rinci kekuasaan yang spesifik, historis, dan bagaimana bentuk-bentuk ini muncul dari bentuk sebelumnya. Oleh karena itu, ia mengidentifikasi bentuk-bentuk kekuasaan modern, seperti bentuk yang terkait erat yang disebutnya "kekuatan disipliner" dan "kekuatan hayati", dan sebelumnya, bentuk-bentuk pramodern seperti "kekuasaan berdaulat" (Kamahi, 2017).

Foucault juga percaya bahwa pengetahuan dan kekuasaan berjalan beriringan, seperti dua bagian dari koin dan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada relasi kekuasaan yang tidak terkait dengan bagaimana suatu bidang pengetahuan berkembang, dan tidak ada pengetahuan yang tidak secara

bersamaan mengandaikan dan membentuk relasi kekuasaan (Adlin, 2016). Wacana, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberi corak baru pada pemikiran postmodern. Ide-idenya masih diperdebatkan dengan hangat pada saat ini.

Dalam Analisis Wacana Kritis (AWK), ada banyak teori dari para ahli yang dapat diterapkan untuk menganalisis sebuah wacana. Salah satunya adalah Norman Fairclough. Menurut Norman Fairclough dalam (Rasyid, 2009) wacana merupakan penggunaan bahasa yang dipahami sebagai praktik sosial yang menggambarkan hubungan dialektis di antara peristiwa tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Kata kritis memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang mengacu pada wacana yang dikaji.

Analisis wacana kritis adalah upaya atau suatu proses dalam menguraikan sebuah teks (realitas sosial) (Suharya, 2021). Menganalisis wacana merupakan analisis dari bahasa yang dipakai manusia, tidak dibatasi pada bentuk bahasa yang tidak terikat pada tujuan dan fungsinya dalam keperluan manusia serta bahasa tersebut berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis (Djokowidodo, 2020). Tujuan analisis wacana kritis mengungkap peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan dunia sosial, dalam hal ini termasuk hubungan sosial yang melibatkan kekuasaan.

Analisis wacana kritis (AWK) pada dasarnya mengangkat perbedaan atas pesan, pola, dan tema yang menimbulkan friksi di kalangan masyarakat pada umumnya (Ghorbani, 2014). AWK merupakan representasi dari realitas sosial yang terlibat di dalamnya unsur bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Ghorbani M. T., 2015). (Fairclough, 1995) memandang bahwa wacana merupakan suatu bentuk praktik sosial. Dalam pandangan tersebut, bahasa merupakan bagian dari masyarakat, dan bukanlah sesuatu yang berasal dari luar. Jadi, dalam penelitian wacana seseorang hendaknya tidak hanya menganalisis teks, melainkan menganalisis produksi antara teks, proses, dan kondisi sosial. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Van Dijk (Djarmika, 2014) bahwa wacana itu tidak hanya menyangkut penggunaan bahasa, tetapi lebih dari itu yang melibatkan beberapa komponen penting yang lain dari konsep wacana, di antaranya dengan melibatkan siapa yang menggunakan bahasa, bagaimana menggunakannya, mengapa menggunakannya, dan kapan menggunakannya. Artinya, pembahasan wacana dan tuturan harus dalam satu rangkaian kesatuan situasi atau dengan kata lain, makna suatu bahasa berada dalam rangkaian konteks dan situasi.

Wacana yang menyangkut penggunaan bahasa dapat menimbulkan polarisasi. Polarisasi merupakan terbelahnya masyarakat dalam menyikapi suatu isu politik, yang biasanya terjadi karena perubahan sosio-kultural masyarakat dan munculnya elite politik baru. Polarisasi politik timbul ketika dua anasir yang berbeda atau berseberangan disebabkan oleh sebuah isu, kebijakan, atau ideologi. Polarisasi menjadi tantangan baru dalam perhelatan pemilihan umum di Indonesia (Mansyur, 2023).

Fenomena polarisasi banyak terjadi di tataran *grassroots* atau massa dibandingkan di tingkat elite politik. Wilson mengemukakan bahwa polarisasi timbul karena adanya komitmen yang kuat terhadap suatu ideologi, budaya, atau preferensi politik sehingga mengakibatkan terpecahnya suatu kelompok dengan kelompok lain. Polarisasi mengakibatkan masing-masing kelompok memiliki anggapan pandangan serta prinsipnya yang paling benar, dan kelompok yang berseberangan dianggap salah (Annas, 2019). Polarisasi publik menjadi fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk identitas politik dan peran elite politik. Di ranah digital, polarisasi politik tampak nyata melalui opini-opini publik yang disebarluaskan di media sosial. Hal tersebut semakin mempertajam perpecahan dalam masyarakat.

Pemilu 2024 memiliki jenis polarisasi di media sosial yang berbeda dengan polarisasi pada pemilu 2019. Polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 di media sosial mengarah kepada polarisasi agama. Di media sosial seperti Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya algoritma yang disuguhkan kepada audiens sangat banyak menampilkan konten-konten berbau agama. Misalnya, polarisasi antara konten agama yang radikal dan konten agama yang lebih pro terhadap pemerintah. Hal ini berbeda jauh dengan polarisasi di media sosial pada pemilu 2024.

Algoritma media sosial Instagram dan Twitter (X) lebih banyak menayangkan konten yang rasional dan irasional.

Polarisasi yang terjadi di media sosial Instagram dan Twitter (X) pada pemilu 2024 mengarah pada pembatasan konten setiap calon. Calon Presiden Anies Baswedan pada konten-konten Instagram dan Twitter dalam sisi positif sering diidentikkan dengan sosok yang rasional, *public speaking* yang bagus, hingga terbuka dengan rakyat dan mengusung perubahan. Calon Presiden Prabowo Subianto sering diidentikkan dalam bentuk positif sebagai sosok yang tegas, kesatria, dan memiliki program berkelanjutan. Sementara itu, Calon Presiden Ganjar Pranowo sering diidentikkan dengan sosok yang merakyat, asyik, dan memiliki pengalaman yang baik. Akan tetapi, polarisasi tidak hanya berbentuk positif, ada yang juga berbentuk negatif. Hal itu terjadi dalam pemilu 2024 yang mana isu-isu dari setiap capres dan cawapres diangkat melalui konten-konten dan ditayangkan dalam bentuk narasi, audio, maupun visual bahkan yang mengarah pada hoaks. Ini menjadi suatu permasalahan yang serius karena bisa menimbulkan efek domino yang panjang. Pola diksi dan narasi yang digunakan dalam media sosial Instagram dan Twitter (X) mampu menggiring opini masyarakat sehingga penulis tertarik dan merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian ini dengan harapan mampu membawa sebuah kebaruan perspektif melalui analisis wacana terhadap polarisasi di media sosial pada pemilu 2024.

Tinjauan teoretis digunakan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai konsep, teori, literatur, atau penelitian yang terkait dengan suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, tinjauan teoretis terdiri dari tiga penelitian sejenis, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Ismail dengan judul *Power and Voices of Authority in the Media Narrative of Malaysian Natives: Combining Corpus Linguistics and Discourse Analysis Approaches*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah “Orang Asli” secara konsisten digambarkan di sekitar narasi berita stereotipe seperti isu hak atas tanah dan sumber daya lainnya. Kami juga menemukan bahwa suara para pemimpin istilah “Orang Asli” dibayangi oleh otoritas lain seperti pemerintah negara bagian. Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti (Ismail et al., 2020).

Penelitian kedua yang dijadikan landasan adalah penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Jamiludin dengan judul *Representation of Indonesian women workers: a critical discourse analysis on the newspapers of nationalist-secular and Islamic ideological perspectives*, penelitian ini dipublikasikan pada Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol.10 no.1 tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberitaan surat kabar Rakyat Merdeka yang berideologi nasionalis-sekuler sedikit mencerminkan perempuan. Representasi digunakan untuk meminta perlakuan yang menguntungkan dari pemberi kerja. Mengikuti permintaan 'pasar' adalah motivasi yang menjadi jelas. Koran Republika, di sisi lain, condong ke doktrin Islam dan menggambarkan karyawan perempuan apa adanya dengan maksud untuk mempromosikan kesetaraan. Ini adalah kesimpulan dari cita-cita ideologis Islam yang dianut oleh surat kabar tersebut. Selain itu, penelitian ini membantah anggapan bahwa Islam menghilangkan perempuan dari masyarakat. Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti (Badara & Jamiludin, 2020).

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Mouna dengan judul *Critical Discourse Analysis on the Representation of Muslims in Britain in the Daily Mail Newspaper*, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sebuah artikel di surat kabar Daily Mail Inggris yang ditulis tentang minoritas Muslim Inggris, hasil penelitian menunjukkan bagaimana strategi implisit digunakan untuk menampilkan garis biner antara AS dan mereka. Kelompok THEM identik dengan ekstremisme, irasionalitas, dan penindasan terhadap perempuan, sedangkan AS digambarkan sebagai kelompok yang melayani keadilan dan memberantas fanatisme dan radikalisme. Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan

fokus yang diteliti (Benhaddou, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada upaya pendeskripsian mengenai bagaimana relasi kuasa media sosial menjadi ruang pertarungan polarisasi pemilihan umum 2024. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara faktual dan sistematis mengenai fakta-fakta dan hubungan dengan fenomena yang diamati. Data dalam penelitian ini adalah konten politik mengenai pilpres 2024 di media sosial Twitter dan Instagram. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi *content analysis* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian wacana polarisasi pemilu ini menggunakan teknis analisis data. Teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data.

Menurut Santoso studi *content analysis* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi isi teks. Analisis Wacana terus menerus terlibat dalam hubungan kekuasaan karena teks dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan terutama dalam hal penciptaan subjek dan bentuk representasi sosial lainnya (Soejoeti, 1999). Dalam model Fairclough ini teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat (Eriyanto, 2001). Fairclough menyarankan sebuah pendekatan bahasa secara multidisiplin dan menggabungkan analisis bahasa dengan analisis sosiologi. Pendekatan ini memberikan prospek pemikiran 'kritis' terhadap perubahan sosial dan meningkatkan pemahaman manusia (O'Regan, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil analisis wacana media sosial Instagram dan Twitter (X) tentang polarisasi pemilu 2024 dalam perspektif Norman Fairclough. Analisis media sosial ini merupakan media sosial Instagram dan Twitter yang meliputi dimensi tekstual.



Gambar 1; Berita Akademi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur

Gambar di atas merupakan gambar dari unggahan Instagram oleh Akun Universitas Gajah Mada. Mengacu pada teori yang digunakan oleh peneliti, yakni teori analisis wacana kritis, formula awal yang digunakan adalah penggunaan teksnya. Penggunaan teks bisa dianalisis pada level deskripsi teks, hasilnya teks ini lebih menekankan pada penggunaan bahasanya. Pada level deskripsi ini diharapkan dapat menggali tema yang diangkat oleh para akademisi UGM yang berpandangan bahwa pemilu 2024 mengkhawatirkan.

Petisi Bulaksumur jika diinterpretasikan bisa dipahami bahwa teks petisi tersebut merupakan sebuah bentuk kekhawatiran akan tegaknya hukum di Indonesia. Kalimat “Tindakan-Tindakan Menyimpang” pada petisi bulaksumur menjadi sebuah kode bahwa perpolitikan nasional pada pemilu 2024 dianggap sangat mengkhawatirkan oleh akademisi dan guru-guru besar UGM.

Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tetapi pemilu yang dicampuri oleh tangan-tangan penguasa.

Paragraf kedua yang menyebutkan suatu yang sudah diputus yakni tentang pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Demikian itu adalah ranah hukum, dan pelanggaran etik yang dimaksudkan tidak dapat dikaitkan dengan final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Gibran secara hukum telah sah menjadi Cawapres dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan batas usia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Dirinya telah pula memenuhi syarat sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Demikian juga tentang pernyataan lainnya, utamanya tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, netralitas, dan keberpihakan harus pula disebutkan berbagai bukti yang tersedia. Petisi Bulaksumur mengandung makna "menyamakan sesuatu yang berbeda" atau "membedakan sesuatu yang sama".

### **Wacana Polarisasi Pemilu 2024 pada Media Sosial Twitter**

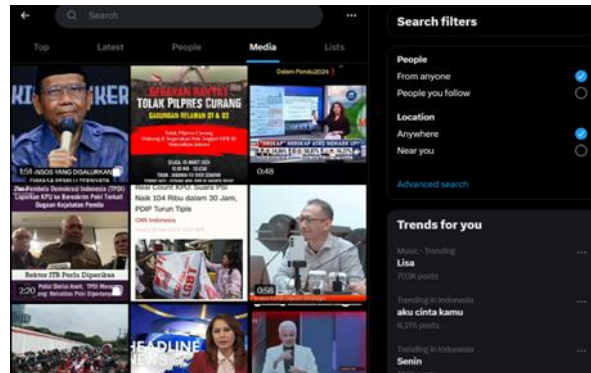
Sebuah wacana di media juga akhirnya dapat membentuk suatu polarisasi. Polarisasi merupakan fenomena populer yang lebih banyak berkembang di tingkat massa ketimbang di tingkat elite politik. Wilson dalam (Nashrullah, 2023) menjelaskan bahwa polarisasi terjadi karena komitmen yang kuat terhadap suatu budaya, ideologi, atau kandidat sehingga memecah suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Selain itu, polarisasi dapat diakibatkan oleh suatu perubahan *framing* komunikasi politik suatu partai.

Saat ini, polarisasi politik masyarakat terlihat melalui opini publik di media sosial yang semakin terbelah. Dampaknya, terjadilah wacana polarisasi, hingga perilaku politik dan fragmentasi sosial. Media baru tidak hanya memberi tahu masyarakat mengenai isu yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana bertindak terhadap isu tersebut. Hal ini menjadi ancaman besar bagi kesatuan negara, terutama menjelang pemilihan umum di media massa, baik yang versi konvensional maupun daring, berpeluang menyisipkan kepentingan politik tertentu dalam pemberitaannya. Wacana polarisasi merujuk pada proses pembentukan dan penyebaran pandangan atau opini yang sangat berbeda dan terpolarisasi dalam masyarakat, sehingga memicu perpecahan dan konflik (Budiman, 2019).

Fairclough menawarkan tiga definisi wacana. Pertama, definisi wacana yang paling umum adalah praktik sosial penggunaan kata-kata. Kedua, wacana dicirikan sebagai gaya bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk wacana politik, ilmiah, dan lainnya. Ketiga, wacana digunakan untuk menggambarkan metode berbicara yang memberikan makna pengalaman dari sudut pandang tertentu. Contoh tuturan jenis ini antara lain wacana feminis, wacana Marxis, wacana neoliberal, dan sebagainya.

Analisis wacana kritisnya dibangun di sekitar dialektika antara struktur sosial dan wacana atau praktik sosial. Menurutnya, praktik sosial bukan hanya cerminan realitas yang otonom; sebaliknya, ia terus terlibat dalam dialog dialektis dengan realitas dan memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Sebaliknya, realitas dapat memengaruhi dan membentuk praktik-praktik sosial. Kesimpulannya bahwa wacana atau praktik sosial terikat secara dialektis dengan struktur sosial sebagai komponen realitas. Fairclough secara otomatis menolak anggapan bahwa wacana setara dengan teks yang memandang wacana sebagai praktik sosial. Menurutnya, teks adalah produk sampingan dari proses yang digunakan untuk memproduksinya daripada proses itu sendiri. Wacana lebih komprehensif daripada teks itu sendiri, mencakup proses interaksi sosial yang lengkap secara keseluruhan (Fairclough, 1995). Alhasil, analisis wacana yang disajikan tidak hanya mempertimbangkan teks, tetapi juga bagaimana pembaca mengonsumsinya sekaligus mempertimbangkan bagaimana kaitannya dengan konteks sosiokulturalnya.

Bagi Fairclough, kontras antara teks dan wacana sangat penting untuk memperkuat pandangannya tentang wacana sebagai praktik sosial. Teks tidak dipandang sebagai otonom, terlepas dari konteks sosial, atau menggunakan frase Michael Riffaterre, sebuah "teks mandiri" jika hanya dilihat sebagai komponen wacana. Louis Althusser mengklaim bahwa teks dipengaruhi oleh lingkungannya dan oleh kekuatan sosial. Said mengklaim bahwa "teks memasukkan wacana" sebagai hasil penciptaannya. Sebuah teks tertulis secara inheren terletak dalam ruang, waktu, dan masyarakat di mana ia muncul ketika itu adalah konsekuensi dari interaksi antara penulis dan media



(Aminudin, 2022).

Gambar 2 Polarisasi Media Sosial Twitter Pemilu 2024

### Praktik Polarisasi dalam Pemilu 2024 pada Media Sosial Instagram

Suatu penjelasan akan bergantung pada sejumlah faktor, seperti kepercayaan, budaya, dan ideologi. Tahap eksplanasi mencoba menggambarkan wacana sebagai proses sosial, sebagai praksis sosial, yang menunjukkan bagaimana reproduksi mempengaruhi wacana dan bagaimana wacana dipengaruhi oleh struktur sosial. Struktur sosial dalam setting ini adalah tempat relasi kekuasaan terkonsentrasi. Tahap eksplanasi terdiri dari dua bagian: (1) proses perjuangan terkait wacana sebagai komponen perjuangan sosial, (2) struktur relasi kuasa terkait dengan penjelasan kita tentang penunjukan relasi kuasa dalam menentukan wacana.



Gambar 3 Unggahan berita pandangan tim TPN Ganjar-Mahfud tentang program makan siang gratis

Praktik sosial bisa dilihat dari unggahan akun instagram @metrotv yang menayangkan berita dari TPN Ganjar-Mahfud. Tanggapan itu berdasarkan pada program makan siang gratis yang menjadi fokus dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Dalam unggahan berupa

video tersebut, bisa diamati bahwa tim TPN Ganjar-Mahfud menyatakan bahwa program makan siang gratis tak masuk akal.

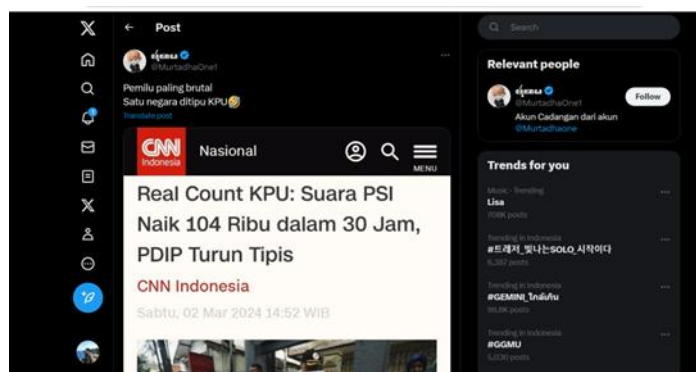
Wacana program-program yang diusung oleh setiap capres sering diberitakan melalui akun-akun Instagram, sehingga teks, audio, maupun visual yang ditampilkan membuat polarisasi bagi para audiens pengguna media sosial Instagram. Misalnya, teks atau narasi pada postingan di atas membuat seolah-olah program makan siang itu tidaklah masuk akal. Begitu juga dengan program yang diusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan mengusung program BBM gratis, atau pasangan Ganjar-Mahfud yang mengusung program internet gratis. Dalam media sosial, program-program tersebut dipublikasikan dengan narasi-narasi yang tak masuk akal hingga narasi yang menjatuhkan.

Hal yang terpenting justru persiapan penyelenggaraan perlu terus didorong dengan membangun optimisme dan keyakinan publik untuk menyukseskan agenda demokrasi tersebut. Bukan justru mematahkannya dengan wacana-wacana yang membingungkan dan memantik perdebatan berlarut. Polarisasi pemilu bisa memiliki konsekuensi politik yang signifikan, termasuk perdebatan di media sosial yang akan terus berlarut-larut. Hal ini penting untuk diperhatikan serta dipertimbangkan dengan cermat dalam konteks hukum dan demokrasi yang sehat.

## Diskursus Polarisasi Media Sosial pada Pemilu 2024

Membahas soal diskursus tidak terlepas dari ideologi dari masing-masing kelompok. Menurut Fairclough, ideologi diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan kekuasaan. Untuk lembaga sosial atau masyarakat secara keseluruhan untuk mendukung atau mempertahankan hubungan kekuasaan, itu harus ada. Menurut definisi Fairclough tentang ideologi, yaitu sebagai berikut: “significations/constructions of the reality ... which are built into several various dimensions of the forms/meanings of discursive practices and which contribute to the production, reproduction or transformation of relations of dominations” (Fairclough, 1992). Hal tersebut karena bertujuan untuk membangun relasi dominasi dalam masyarakat, produksi makna terhadap realitas melalui bahasa—dalam hal makna tentang dunia, interaksi sosial, dan identitas sosial—bersifat ideologis.

Teori John Thompson yang mengatakan bahwa ideologi adalah praktik yang ada dalam setiap proses pembentukan makna yang diarahkan untuk menjaga hubungan kekuasaan, memiliki pengaruh signifikan terhadap konsep Fairclough tentang bagaimana ideologi merupakan intrinsik dalam praktik diskursif. Hal ini juga sejalan dengan pendapat akademisi Marxis lainnya, seperti Althusser dan Gramsci, yang melihat pentingnya mempertahankan status quo dengan terus menghasilkan makna dalam kehidupan sehari-hari. Althusser, di sisi lain, menekankan unsur-unsur ideologi yang membuat subjek interpelasi dan berada dalam posisi pasif, sehingga transformasi sosial tidak mungkin terjadi. Fairclough dengan hati-hati menekankan agensi subjek agar transformasi sosial muncul. Konflik ideologi, dalam pandangannya, justru merupakan salah satu aspek dari praktik diskursif yang bertujuan untuk merombak ideologi dan praktik diskursif saat ini dalam konteks restrukturisasi dan perubahan relasi dominasi.





### Gambar 3 Unggahan berita di Twitter (X) tentang hasil perolehan suara PSI pada pemilu 2024

Penelitian wacana penundaan pemilu ini menggunakan teknis analisis data, yang mana teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis. Wacana yang dihembuskan oleh media CNN yang berisi tentang informasi publik, digiring menjadi narasi yang berbeda ketika diunggah di twitter (X) oleh akun @MurtadhaOne1 dengan tulisan “Pemilu Paling Brutal, satu negara ditipu KPU”.

Dalam teks yang ditulis, wacana diidentifikasi sebagai jenis interaksi. Kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa yang diciptakan oleh seseorang tidak melibatkan diri orang itu sendiri secara mendalam, tidak seperti orang-orang yang sedang cekikikan atau di bawah pengaruh hipnotis. Namun, penggunaan bahasa setiap orang memiliki tujuan untuk berinteraksi dengan orang terdekat. Tujuan interaksi ini antara lain menghibur, mencerahkan, merangsang debat, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa dalam bisnis memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara diam-diam di bawah pengawasan yang ketat, terutama saat mengumpulkan pendapat calon karyawan.

Polarisasi media sosial Instagram dan Twitter (X) tentang pemilu 2024 sangat beragam. Apalagi dengan adanya tiga pasangan calon presiden, polarisasi ini semakin berkembang di media sosial. Berbeda dengan pemilu 2019 yang hanya menghadirkan dua pasangan calon, polarisasi yang terjadi di media sosial arahnya lebih jelas, hingga ada istilah cebong dan kampret bagi para pendukung pasangan tertentu. Namun, pemilu 2024 polarisasi yang terjadi di media sosial lebih mengarah pada pembangunan opini masyarakat kelas atas, menengah, dan bawah. Sehingga polarisasi yang terjadi di media sosial pada pemilu 2024 mengerucut pada dua segmentasi audiens, yaitu perubahan dan berkelanjutan. Sehingga konten-konten tayang di media sosial Instagram dan Twitter (X) banyak penggiringan teks dan narasi opini untung saling menjatuhkan dan saling membersihkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wacana polarisasi pemilu 2024 menggunakan perspektif Norman Fairclough dapat disimpulkan bahwa: Pertama, narasi/teks berita yang digunakan oleh pengguna media sosial Twitter tidak hanya sekadar teks berita, tetapi bernuansa argumentasi dan deskripsi yang menjelaskan isu negatif pada pemilu 2024. Kedua, wacana media sosial khususnya Instagram cenderung mengangkat isu-isu kontroversial yang ada di Indonesia, isu kontroversi yang dimaksud adalah adanya dugaan upaya melawan hukum dan cenderung bersifat politis yang artinya kepentingan si pembuat konten lebih dominan daripada pemberitaan yang berimbang. Poin terakhir adalah jika dilihat dari aspek ideologi, media sosial Instagram dan Twitter memberikan pencitraan negatif dengan menyudutkan penguasa negeri dalam hal ini pemimpin pemerintah era presiden Jokowi, sehingga publik menilai negatif tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari pihak istana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, A. (2016). Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 1(1), 13–26.
- Aminudin, A. (2022). Menghadapi Disinformasi Konten Berita Digital di Era Post Truth. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(2), 283–292.
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20(2), 111. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>
- Arif, M. (2012). Etnografi Virtual: Sebuah Tawaran Metodologi Kajian Media Berbasis Virtual. *Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2), 165–179.

- Badara, A., & Jamiludin, J. (2020). Representation of Indonesian Women Workers: A Critical Discourse Analysis on The Newspapers of Nationalist-secular and Islamic Ideological Perspectives. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 79–101.
- Benhaddou, M. (2021). A Critical Analysis on the Representation of Muslims in Britain in the Daily Mail Newspaper: Applying Discourse Analysis. *International Journal of Language and Literary Studies*, 3(3), 216–224.
- Bolter, J. D., & Grusin, R. (2000). *Remediation: Understanding new media*. mit Press.
- Djatmika. (2014). *Pernik Kajian Wacana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djokowidodo, A., & Robik Anwar Dani, D. (2020). Psikopragmatik dalam Tuturan Wacana Iklan: Tinjauan Tentang Pengaruh Psikologis terhadap Tindak Tutur Siswa SMA di Kota Madiun. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(15), 151–157. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i3.42542>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity,.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. Edward Arnold: London.
- Fairclough, N. (1996). *Language and Power Discourse*. Newyork.
- Ismail, H., Baharun, H., Abdullah, H., & Abd Majid, S. N. (2020). Power and Voices of Authority in the Media Narrative of Malaysian Natives: Combining Corpus Linguistics and Discourse Analysis Approaches. *3L, Language, Linguistics, Literature*, 26(2).
- Jalal, M. (2007). Praktik Diskursif the Theory of Truth Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa di Indonesia. *Journal Universitas Airlangga*. Retrieved from [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Praktik Diskursif.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Praktik%20Diskursif.pdf)
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, 117-133.  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/AlKhitabah/article/view/2926>
- Mansyur, Ibnu Chaerul. Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*. 11, No. 1 (30 June 2023): 1–22. <https://doi.org/10.24252/Profetik.V11i1a1>.
- Nurhidayat, I., & Garis, R. R. (2023). Trend Komunikasi Politik di Media Sosial. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(2), 1–24.
- O'Regan, J. P. (2001). Discourse In Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. *Language and Intercultural Communication*, 1(2), 151–174.
- Rasyid, Armiaati. 2009. Nilai Relasional Model Kalimat dalam Wacana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008—2013 (Analisis Wacana Kritis). *Jurnal Sawerigading*, Volume 15 Nomor 2, Agustus 2009.
- Santoso, D. H. (2015). Media dan Politik: Pertarungan Ruang & Kuasa Media Menjelang Pemilihan Presiden. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 1(1).
- Soejoeti, S. Z. (1999). Paradigma Metodologi Penelitian Kualitatif dan Permasalahannya. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 9(3), 20767.
- Suharya, S., & Missriani, R. W. (2021). Analisis Wacana Kritis Teks Pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. *Jurnal Bindo Sastra*, 5(2), 32–36.
- Sumanti, S. T. (2023). Analysis of Interpersonal Communication Patterns of Love Scams Mode on Social Media in Female Students in Medan City. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(1), 74–

85.

Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh kekuasaan atas Pengetahuan (memahami teori relasi kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.